

---

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP SLACK ANGGARAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

Oleh

Jamaluddin<sup>1)</sup>, Rahmad<sup>2)</sup> & Umar Iskandar<sup>3)</sup><sup>1,2,3</sup> Prodi Administrasi Bisnis, FISIP UmuslimEmail: <sup>1</sup>[jamaluddin.akt@gmail.com](mailto:jamaluddin.akt@gmail.com), <sup>2</sup>[rahmad\\_1984@ymail.com](mailto:rahmad_1984@ymail.com) & <sup>3</sup>[umariskandar65@gmail.com](mailto:umariskandar65@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Desentralisasi Terhadap *Slack* Anggaran di Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Nilai R sebesar 0,711 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) secara simultan dengan *slack* anggaran. Secara simultan kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) memiliki hubungan yang kuat dengan *slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian nilai R-Square sebesar 0,506 atau 50,6 persen menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada *slack* anggaran sebesar 50,6 persen. Artinya secara bersama-sama kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 50,6% terhadap *slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara, sisanya 49,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel independen partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi serta implementasi desentralisasi yang tinggi akan meningkatkan *slack* anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasi & Slack Anggaran****PENDAHULUAN**

Lahirnya otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam bentuk otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sebagai sebuah pilihan politik, desentralisasi jelas merupakan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah akut kenegaraan yang terjadi pada saat itu. Sayangnya, dalam tataran implementasinya, desentralisasi seperti belum menampakkan hasil yang optimal.

Bahkan muncul kekhawatiran bahwa keberadaan otonomi daerah malah membuat daerah tidak terlalu peduli dengan tujuan pembangunan ekonomi dan upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Elite

daerah dianggap hanya bersaing merebut kekuasaan dan tidak peduli pembangunan apalagi kesejahteraan masyarakat (Bambang Brodjonegoro, 2009:1).

Terdapat berbagai pemicu diantaranya adalah masih belum maksimalnya sistem yang ada, kurang tepatnya proses pencapaian kinerja pemerintah daerah, tidak berjalannya sistem pengendalian internal yang memadai, sampai kepada *slack* (penyimpangan) anggaran yang sengaja dilakukan demi memperkaya diri maupun kelompok. Proses penyusunan anggaran di Kabupaten Aceh Utara mengacu pada peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melibatkan banyak partisipasi baik dari unsur pemerintah, legislatif maupun masyarakat.

Penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan skala prioritas program dan kegiatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tahap penyusunan anggaran dari masing-masing dinas/instansi, penelitian oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pembahasan oleh legislatif dan diakhiri penetapannya oleh legislatif bersama pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Bambang Suprasto (2006) APBD sebagai anggaran sektor publik harus mencakup aspek perencanaan,

pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat rakyat kepada eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, anggaran daerah harus disusun dengan paradigma yang baru.

Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Secara umum *slack budgeting* atau kelonggaran dalam anggaran adalah usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen dalam mempengaruhi jumlah biaya dan pendapatan yang akan ditetapkan dalam anggaran, sehingga mudah dicapai dan dapat memberikan keuntungan bagi manajer ataupun divisi yang terkait. Variabel senjangan anggaran diukur dengan instrument yang dibuat oleh Dunk (1993), dan digunakan oleh Darlis (2000), Rasuli (2002).

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).

Menurut Imam Ghazali (2005) analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Persamaan umum analisis regresi ganda adalah:

Dimana:

- Y = *Slack* Anggaran  
 a = Nilai intercept (konstanta)  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi  
 X<sub>1</sub> = Partisipasi Penyusunan Anggaran  
 X<sub>2</sub> = Desentralisasi  
 ε = error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada *slack* anggaran yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi). Berdasarkan hasil pengolahan data partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi terhadap *slack* anggaran diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Koefisien Regresi  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.621	.895		-.694	.494
1 Partisipasi	.415	.159	.389	2.603	.016
Desentralisasi	.581	.164	.527	3.531	.002

a. Dependent Variable: *Slack* Anggaran

Melalui hasil pengolahan data seperti disajikan pada tabel 4.19 maka dapat dibentuk model prediksi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi terhadap *slack* anggaran sebagai berikut.

$$Y = -0,621 + 0,415 X_1 + 0,581 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat koefisien partisipasi penyusunan anggaran bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan *slack* anggaran.

Demikian juga koefisien desentralisasi bertanda positif menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi akan meningkatkan *slack* anggaran, sedangkan konstanta negatif yang ada dalam persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel *slack* anggaran bersifat negatif karena dapat menimbulkan penyimpangan atau menuju ke arah negatif jika tidak terjadi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap *slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Secara procedural semakin tinggi keterlibatan aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan mengurangi terjadinya kelonggaran/*slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Desentralisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Semakin tinggi implementasi desentralisasi (pelimpahan tugas dan wewenang) maka akan semakin mengurangi kelonggaran/*slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *slack* anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.

### Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan agar dapat meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah sampai ketinggian staf, eselon IV dan eselon III.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mengambil responden dari para anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Penelitian selanjutnya supaya dapat mengembangkan variabel independen seperti komitmen organisasi, informasi asimetris, *budget pressure*, ketidakjelasan tugas dan tingkat ketidakpastian lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah APBD*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- [2] Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat Jakarta.
- [3] Bambang Brodjonegoro, PS. 2009. "Indonesia dan Otonomi Daerah: Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran", dalam KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), *Sewindu Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi*, Jakarta.
- [4] Bambang Suprasto, H. 2006. *Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 11 Nomor 3 Tahun 2006.
- [5] Bambang Yudoyono. 2001. *Otonomi Daerah*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- [6] Belianus Patria Latuheru. 2005. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating" *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Volume 7 Nomor 2 Hal 117-130.
- [7] Darlis, E. 2000. *Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- [8] Darlis, Slamet. 2002. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5. No.1.
- [9] Falikhatun. 2007. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 6, No.2, hal 207-221.
- [10] Fitriasuri. 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjang Anggaran dengan Variabel Moderat Komitmen Organisasi, Desentralisasi, Ketidakpastian Lingkungan*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- [11] Hafisah. 2005. *Pengaruh Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Anggaran dengan Kesenjangan Anggaran*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan
- [12] Hansen dan Mowen. 1996. *Management Accounting*. South Western : Thomson.
- [13] Harian Serambi Indonesia. 13 Januari 2012. *Bupati Minta Dewan Percepat Sahkan APBK*. Halaman 13.
- [14] Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [15] Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [16] \_\_\_\_\_. 2006a. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga. Jakarta.
- [17] \_\_\_\_\_. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- [18] Indra Yuwono B, 1998. "Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran" *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1: 37-55. April 1999.
- [19] Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- [20] Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik", Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [21] \_\_\_\_\_. 2009. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [22] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- [23] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 
- [24] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [25] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [26] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [27] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- [28] Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [29] Sugiyono. 2001. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit: CV. Alfabeta

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN